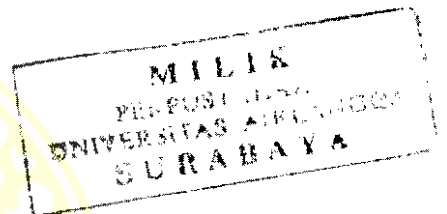


**PERANAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ON-LINE
UNTUK MENUNJANG KELANCARAN PENGENDALIAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



DIAJUKAN OLEH

LIA INDRIATI

No. Pokok : 049615165

KEPADA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA

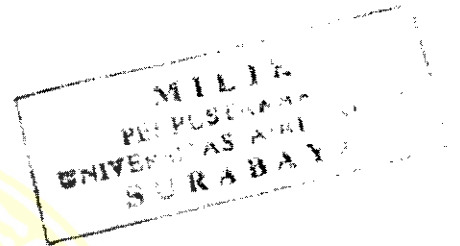
SURABAYA

2000

SKRIPSI

**PERANAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ON-LINE
UNTUK MENUNJANG KELANCARAN PENGENDALIAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

DIAJUKAN OLEH:
LIA INDRIATI
No. Pokok: 049615165



TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,


Drs. DJOKO DEWANTORO, MSi. Ak.

TANGGAL.....

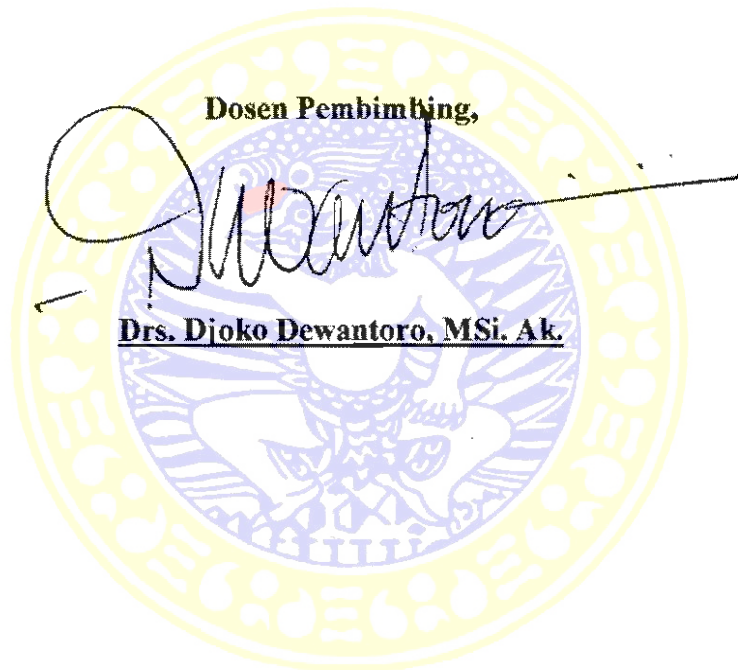
KETUA PROGRAM STUDI,


Drs. WIDI HIDAYAT, MSi. Ak.

TANGGAL.....^{25/}200⁶.....₁₂.....

Surabaya, 13-11-2000.....

Diterima dengan baik dan siap untuk diuji



ABSTRAKSI

Salah satu bentuk penerimaan negara yang semakin penting adalah penerimaan di bidang perpajakan. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dapat ditempuh melalui pembenahan peraturan di bidang perpajakan dan sistem pengawasan pajak yang efektif. Sistem pengawasan untuk PPN sebaiknya ditekankan pada suatu sistem pengendalian dini yang terintegrasi terhadap faktor pajak dengan dukungan sistem informasi *on-line*. Dengan sistem pengendalian dini secara *on-line* dapat dipastikan bahwa semua penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh semua PKP telah diadministrasikan dengan benar dan tidak terjadi adanya kebocoran pajak.

Dari hasil penelitian pada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur khususnya pada bidang IAP dan bidang PPN dan PTLL, diketahui bahwa sistem informasi PPN terdiri dari sistem penerimaan SPT Masa, sistem pengolahan SPT Masa, dan sistem pemeriksaan SPT Masa. Sistem pengendalian PPN dimulai dari pemeriksaan kelengkapan SPT Masa yang diterima oleh petugas di KPP. Setelah SPT dinyatakan lengkap maka dilakukan pengolahan SPT yang meliputi kegiatan penelitian, editing, dan perekaman. Pada pemeriksaan SPT Masa, porsi terbesar pemeriksaan adalah pada SPT Lebih Bayar dengan melakukan konfirmasi faktor pajak masukan terhadap PKP yang meminta restitusi. Konfirmasi faktor pajak masukan sering kali mengalami kesulitan karena beredarnya faktor pajak fiktif. Sedangkan pengawasan penerimaan pajak dilakukan dengan sistem *internal check* terhadap SSP lembar ke-2. Dari proses yang panjang dan rumit terhadap proses pengawasan dan konfirmasi SSP lembar ke-2, maka perlu adanya jalur yang cepat tanpa mengurangi hakekat pengamanan. Sistem informasi PPN ini didukung adanya jaringan komunikasi VSAT di Kanwil IX DJP dengan KPP Wonocolo dan Tegalsari sebagai subLANnya.

Sistem informasi PPN secara *on-line* ini menunjang pengendalian PPN tanpa harus meninggalkan sistem *self assessment* dan menghilangkan fungsi pelayanan dari KPP. Setiap bulan PKP tetap wajib melaporkan SPT Masanya ke KPP. Akses secara *on-line* terhadap sistem informasi PPN dapat memberikan pengamanan untuk pengawasan pelaksanaan PPN secara cepat dan terintegrasi, sehingga kebocoran pajak dapat diantisipasi lebih dini.